



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV							
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	nilai				13.03	meningkatkan kesesuaian LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014	persentase OPD yang menyusun LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014	%	100					Tersusunnya Laporan kinerja OPD tepat waktu	Jumlah Perangkat daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Perangkat daerah	46					Terlaksananya Verifikasi LKJIP	Jumlah LKJIP yang telah di verifikasi	laporan	46								
																								Terlaksananya Reviu LKJIP	Jumlah LKJIP yang telah di reviu					laporan	46			
																								Meningkatnya kompetensi SDM Perangkat Daerah dalam Pelaporan Kinerja	Persentase peserta pelatihan penyusunan pelaporan kinerja yang hasil pre test dan post testnya mengalami peningkatan					%				
							Meningkatnya efektifitas penggunaan sumber daya (APBD)	persentase perangkat daerah dengan Capaian kinerja APBD minimal 80%	%		75	Meningkatnya kesesuaian penyerapan APBD dengan Time schedule / Rencana anggaran kas (RAK)	Persentase Perangkat daerah dengan penyerapan APBD sesuai RAK	%	70	70	80	80	terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyerapan anggaran secara berkala	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi penyerapan anggaran secara berkala	Laporan	3	3	3	3									
	Nilai LPPD	nilai	3.41				meningkatkan kesesuaian LPPD dengan pedoman penyusunan LPPD	persentase data dukung IKK yang sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD	%	100					meningkatkan kualitas data dukung IKK	persentasi data dukung IKK yang terverifikasi	%	100				terlaksananya pendampingan pemenuhan data dukung IKK	Jumlah Perangkat daerah yang didampingi dalam pemenuhan data dukung IKK	Perangkat Daerah	28									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks				4.36	Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan layanan publik.	Persentase standar pelayanan yang dipublikasi pada SIPPN	%				60.87	melaaksanakan update standar pelayanan pada SIPPN	Jumlah Unit pelayanan yang melakukan Update standar pelayanan pada SIPPN	Unit pelayanan				10	terlaksananya fasilitasi pendaftaran akun SIPPN	Jumlah UP yang memiliki akun SIPPN	Unit pelayanan		100									
							Meningkatnya pengawasan dan perbaikan atas penyelenggaraan layanan publik.	Persentase unit layanan dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik nasional	%		32.5	terlaksananya evaluasi data dukung PEKPPP	persentase UP yang dievaluasi data dukungnya	%		100	terlaksananya sosialisasi PEKPPP	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PEKPPP	Peserta	170														
Menurunnya potensi penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai MaAdministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai				91.6	Meningkatnya kualitas standar pelayanan publik sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014	Persentase unit layanan yang memenuhi komponen standar pelayanan sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014	%				43.75	terlaksananya reviu standar pelayanan	Persentase UP yang melakukan reviu SP	%				43.75	terlaksananya sosialisasi penyusunan standar pelayanan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi standar pelayanan	peserta			160								
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	indeks				82.9	terlaksananya Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi	Jumlah Kebijakan yang dilakukan harmonisasi	Kebijakan	2	3	5	5	terlaksananya public hearing	Jumlah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat	Kebijakan			1	2	terlaksananya fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Dikasilasi	Produk hukum	5	10	15	20							
							terlaksananya keberlanjutan kebijakan	Persentase perda yang dilindangkannya dengan peraturan	%	15	20	20	20	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan	Persentase hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%			50	terlaksananya evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence based)	Jumlah kebijakan yang dievaluasi	kebijakan	2											
	Indeks Reformasi Hukum	indeks				96.35	Meningkatnya transparansi informasi kebijakan	persentase kebijakan yang di publikasi melalui JDIH Gresik	%	15	25	25	35	terlaksananya dokumentasi produk hukum,	persentase produk hukum yang di dokumentasikan	%	15	25	25	35	terlaksananya digitalisasi produk hukum	Jumlah produk hukum yang terdigitalisasi	Produk hukum	112	187	187	264							
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	indeks kepuasan masyarakat	indeks		3.57		3.57	meningkatkan ketepatan waktu layanan	persentase UP dengan nilai unsur ketepatan waktu layanan minimal 85	%				100	meningkatkan kualitas SOP	Jumlah SOP yang di evaluasi	SOP			46	Tersediarnya SOP	Jumlah PD yang memiliki SOP	Perangkat Daerah				46								
							Meningkatnya transparansi informasi persyaratan penyelenggaraan layanan publik.	Persentase persyaratan layanan yang dipublikasikan	%				100	Terlaksananya Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kali	3	3	3	3	Tersusunnya penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	dokumen	1	2	1	4							
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	indeks				85.66	meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan dalam sirup	%				100	Tersediarnya dokumen rencana umum pengadaan perangkat daerah yang telah diverifikasi.	Jumlah dokumen RUP yang telah diverifikasi.	dokumen	46		46	Terlaksananya penginputan dan pemutakhiran data RUP pada aplikasi SIRUP.	Jumlah Perangkat daerah yang memperbarui paket pengadaan pada sirup	Perangkat Daerah	46				46							
							Meningkatnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa	persentase PPK yang memiliki sertifikat minimal tipe c	%			50	55																					

SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ro. 66.202.107.312.12	16.550.526.829,28	16.550.526.829,28	19.860.632.193,94	13.240.421.462,62
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ro. 29.809.130.233.01	7.452.282.558,25	7.452.282.558,25	8.942.739.069,90	5.961.826.046,60
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Ro. 2.078.226.276.57	519.556.569,14	519.556.569,14	623.467.882,97	415.645.255,31
	JUMLAH		Ro. 98.089.463.822,70				